

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Prosedur Pencatatan Akuntansi Aset Tetap

Menurut Mulyadi (2015: 5), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur adalah kegiatan klerikal (urutan) dari kegiatan sebagai berikut:

1. Menulis
2. Menggandakan
3. Menghitung
4. Memberi kode
5. Mendaftar
6. Memilih
7. Memindah
8. Membandingkan

Menurut Hery (2013:1), Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama mengenai informasi posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada).

Sedangkan menurut Harisson (2012:3), Akuntansi (accounting) adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis.

Informasi akuntansi sangat dibutuhkan oleh seorang penggunanya, adapun para pengguna informasi yaitu:

1. Pengguna Internal

Pengguna Internal yaitu para manager yang merencanakan, mengorganisasikan, dan mengelola suatu bisnis, misalnya: manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan dan pejabat perusahaan.

2. Pengguna Eksternal

Pengguna eksternal adalah mereka yang menghasilkan keputusan terkait dengan hubungan mereka dengan perusahaan, misalnya investor dan kreditor. Investor menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan saat akan membeli, menahan atau menjual saham. Sedangkan kreditor merupakan pemasok dan bankir menggunakan informasi akuntansi untuk digunakan mengevaluasi pemberian kreditor.

3.1.2 Dasar- Dasar Aset Tetap

1. Pengertian Aset Tetap

Menurut IAI, PSAK No. 16 (2011:16.2) adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berdasarkan defenisi tersebut, aset tetap mencakup tujuan penggunaan dan masa penggunaannya. PSAK No. 16 diterapkan untuk pencatatan aset tetap yang tidak tergolong sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual kembali, penambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, serta sumber daya.

2. Pengakuan Aset Tetap

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 tahun 2011 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut dimasa yang akan datang.
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Suatu aset diakui sebagai aset tetap jika perusahaan sudah memperkirakan akan menggunakan aset tersebut selama lebih dari satu periode, seperti suku cadang utama dan peralatan siap pakai yang dianggap sudah memenuhi kriteria aset tetap.

3.1.3 Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap menurut PSAK No. 16 tahun 2011 meliputi:

1. Harga perolehannya termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan yang diinginkan manajemen.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena perusahaan menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau perolehan aset tetap.
- b. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik.

- c. Biaya handling dan penyerahan awal.
- d. Biaya perakitan dan instalasi.
- e. Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut (misalnya, contoh produk dihasilkan dari peralatan yang sedang diuji).
- f. Komisi profesional.

Berdasarkan PSAK No. 16 terdapat beberapa cara untuk memperoleh aset tetap diantaranya:

1. Pembelian Tunai

Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian tunai dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan, yang termasuk didalamnya adalah harga faktur ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian aset biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik nama, biaya pemasangan dan biaya percobaan.

Contoh jurnal pada saat pembelian aset:

Komputer	XX
Kas	XX

2. Pembelian Angsuran

Apabila aset tetap yang dibeli dengan cara pembayaran yang ditangguhkan hingga melampaui jangka waktu kredit normal, maka selisih antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Contoh jurnal pada saat pembelian:

Lori	XX	
	Kas	XX
	Hutang	XX

Contoh jurnal pada saat pembayaran angsuran:

Hutang	XX	
	Bunga	XX
	Kas	XX

3. Perolehan melalui pertukaran

Aset tetap dapat ditukarkan dengan tiga cara, diantaranya:

1. Ditukar dengan surat berharga.
2. Ditukar dengan aset tetap tidak sejenis.
3. Ditukar dengan aset tetap sejenis.

4. Diperoleh dari donasi atau hibah

Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh dari donasi dicatat sebesar harga pasar aset pada saat itu.

5. Aset yang dibuat sendiri

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tentang perolehan aset tetap dengan dibuat sendiri PSAK (IAI, 2011:16.8):

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian. Jika perusahaan membuat aset serupa untuk dijual dalam usaha normal, biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya pembangunan aset. Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan maka setiap laba internal dieliminasi. Demikian pula biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain dalam proses konstruksi aset yang dibangun sendiri tidak termasuk biaya perolehan aset.

3.1.4 Pengukuran Setelah Pengakuan aset Tetap

Menurut PSAK (IAI, 2011:16.11): Perusahaan dapat memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa didalam menetapkan kebijakan akuntansi terhadap aset tetap yang diakui sebagai aset, perusahaan dapat memilih dua model yang sesuai keinginan perusahaan. Dua model tersebut diantaranya:

1. Model Biaya

Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai aset.

2. Model revaluasi

Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan teratur dan cukup umum agar dapat dipastikan bahwa jumlah yang tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Untuk tanah dan bangunan nilai wajar ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang sudah profesiobal berdasarkan bukti pasar. Sedangkan untuk pabrik dan peralatan biasanya dicatat sebesar nilai pasar yang ditentukan oleh penilai. Dalam PSAK (IAI, 2011:16.13) disebutkan bahwa suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset yang dimiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Berikut contoh dari kelompok aset tersendiri:

- a. Tanah
- b. Tanah dan bangunan
- c. Mesin
- d. Kapal
- e. Pesawat udara

- f. Kendaraan bermotor
- g. Perabot
- h. Peralatan kantor

Aset-aset dalam suatu kelompok aset tetap harus direvaluasi secara bersamaan untuk menghindari revaluasi aset secara terpilih dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lainnya pada saat yang berbeda-beda. Namun, suatu kelompok aset dapat direvaluasi secara bergantian sepanjang revaluasi dari kelompok aset tersebut dapat diselesaikan secara lengkap dalam waktu yang singkat dan sepanjang revaluasi terus diperbaharui.

3.1.5 Penyusutan Aset Tetap

Pengertian penyusutan menurut Ikatan Akuntan Indonesia yaitu: “ alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya”(IAI,2011:16.3). Seluruh aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan nilai manfaat. Oleh karena itu, aset tetap akan disusutkan agar perusahaan dapat mengetahui bahwa dari aset tetap yang tercatat tidak lagi dapat mewakili nilai manfaat yang dimiliki aset tersebut. Pengalokasian manfaat atas aset tetap ini juga perlu dilakukan secara sistematis.

Menurut PSAK (IAI, 2011:16.4) pengertian umur manfaat adalah:

1. Periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh perusahaan.
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diperkirakan akan diperoleh oleh perusahaan.

Pengertian nilai residu dari aset menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah “estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya.”(IAI,2011:16.3)

Terdapat beberapa metode untuk menghitung aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan akan disesuaikan dengan karakteristik manfaat ekonomik masa depan aset oleh perusahaan. Berikut ini beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyusutan aset tetap, diantaranya:

1. Metode garis lurus

Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Rumus untuk menghitung penyusutan dengan metode garis lurus adalah sebagai berikut:

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Manfaat}}$$

2. Metode saldo menurun

Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Rumus untuk menghitung penyusutan dengan metode saldo menurun adalah sebagai berikut:

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Nilai Tercatat}$$

3. Metode unit produksi

Metode ini menghasilkan pembebanan berdasarkan pada ekspektasi penggunaan atau keluaran dari aset. Rumus untuk menghitung penyusutan dengan metode jam jasa adalah sebagai berikut:

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Taksiran hasil produksi (Unit)}}$$

Jurnal untuk mencatat beban penyusutan adalah sebagai berikut:

Beban penyusutan aset tetap	XX
Akumulasi penyusutan aset tetap	XX

Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset. Metode tersebut diterapkan secara konsisten

dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomis masa depan aset tersebut.

3.1.6 Kriteria Aset Tetap

Untuk dapat dikelompokkan sebagai aset tetap, maka suatu aset tetap harus memiliki kriteria tertentu, yaitu:

1. Berwujud

Berarti aset tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik. Bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti *goodwill*, hak paten dsb.

2. Umurnya lebih dari satu tahun

Aset tersebut harus dapat dipergunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Walaupun memiliki bentuk fisik, tetapi jika masa manfaatnya kurang dari satu tahun seperti kertas, tinta printer tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap, dan yang dimaksudkan dengan umur aset tersebut adalah umur ekonomis, bukan umur teknis, yaitu jangka waktu di mana suatu aset dapat dipergunakan secara ekonomis oleh perusahaan.

3. Digunakan dalam operasi perusahaan

Barang tersebut harus dapat dipergunakan dalam operasi normal perusahaan, yaitu dipakai perusahaan untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi.

4. Tidak diperjualbelikan

Suatu aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan umurnya lebih dari satu tahun, tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual lagi, tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap dan harus dimaksudkan ke dalam kelompok perusahaan.

5. Material

Barang milik perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun dan dipergunakan dalam operasi perusahaan tetapi nilai atau harga per unitnya atau pun harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibanding total aset perusahaan, tidak perlu dimasukkan sebagai aset tetap.

6. Dimilik perusahaan

Suatu aset berwujud yang bernilai tinggi, dipergunakan di dalam operasi dan berumur lebih dari satu tahun, tetapi disewa perusahaan dari pihak lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aset tetap (Rudianto, 2009:272).

3.1.7 Cara Perolehan Aset Tetap

Cara perolehan aset tetap akan mempengaruhi akuntansi dari aset tetap dalam masalah harga perolehannya. Harga perolehan itu terdiri dari biaya-biaya dalam rangka perolehan aset tetap hingga aset tetap itu digunakan.

Cara perolehan aset tetap menurut Kartikahadi (2012:317) terdiri dari:

1. Pembelian

Harga pembelian adalah jumlah yang dibayarkan untuk mendapatkan aset tetap, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.

2. Dibangun sendiri

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian atau cara lain.

3. Pertukaran

Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset nonmoneter lainnya dinilai pada nilai wajar, kecuali jika:

- a. Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.
- b. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial.

4. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah penyatuan dua atau lebih dari perusahaan yang terpisah menjadi satu pelaporan. Kombinasi bisnis ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya suatu entitas mengakui sisi saham atau bertukar saham dengan entitas lain sehingga menyebabkan timbulnya induk perusahaan.

5. Sewa Pembiayaan

Dalam sewa pembiayaan, prosedur akuntansinya yaitu:

- a. Aset sewaan diperlakukan seolah-olah aset itu telah kepada *lessee*. Aset tersebut dicatat sebagai aset tetap dalam pembukuan *lessee*. *Lessee* adalah perusahaan yang menyewa guna usaha aset tetap dan *lessor* adalah perusahaan yang memiliki aset tetap atau yang memberikan sewa guna usaha.
- b. Fasilitas pembiayaan terkait dicatat sebagai liabilitas (utang usaha) dalam pembukuan *lessee* dan sebagai aset (piutang usaha) dalam pembukuan *lessor*.
- c. Pembayaran sewa berkala dihitung agar mencakup beban/pendapatan keuangan dan pelunasan kewajiban.

6. Pemberian atau hibah

Pada hibah yang berkaitan dengan aset tetap, maka hibah maupun aset tetap yang diterima harus dicatat pada nilai wajar. Hibah dari pemerintah ini hanya boleh diakui jika telah diperoleh suatu keyakinan bahwa entitas akan memenuhi kondisi atau prasyarat hibah tersebut dan hibah akan diperoleh. Hibah yang diterima dicatat sebagai pendapatan selama periode yang berkaitan dengan penggunaan hibah tersebut.

3.1.8 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Menurut PSAK (IAI, 2011:16.20), jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengungkapannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang bisa diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya, tetapi keuntungan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pendapatan. Namun pada perusahaan yang kegiatan usahanya menjual aset yang sebelumnya direntalkan kepada pihak lain, maka perusahaan harus memindahkan aset tetap tersebut menjadi persediaan sesuai nilai tercatat ketika aset tidak lagi dientalkan dan menjadi aset dimiliki untuk dijual. Keuntungan yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

1. Penjualan aset tetap

Dalam penjualan aset tetap memungkinkan timbulnya laba/rugi,

a. Jika aset mendapatkan laba, maka dicatat dengan jurnal

Kas	XX
Akumulasi penyusutan mesin	XX
Laba penjualan	XX
Mesin	XX

b. Jika aset mendapatkan rugi, maka dicatat dengan jurnal

Kas	XX
Akumulasi penyusutan mesin	XX
Rugi penjualan	XX
Mesin	XX

2. Berakhirnya masa manfaat aset tetap (Dibuang)

Dengan cara dibunagnya aset tetap berarti aset tetap tersebut harus dikeluarkan dari pembukuan. Cara mengeluarkan dari pembukuan, harus dibuatkan jurnal yaitu:

a. Jika sudah tidak dapat digunakan

Akumulasi penyusutan	XX
Mesin	XX

b. Jika umur ekonomisnya belum habis

Akumulasi penyusutan	XX
Rugi karena pembuangan	XX
Mesin	XX

3. Pertukaran aset tetap

Dalam melakukan pertukaran aset memungkinkan timbulnya laba atau rugi atas pertukaran aset tersebut. Apabila aset yang ditukar dengan aset yang sejenis. Maka laba atas pertukaran tidak diakui. Sedangkan jika aset yang ditukar mengalami kerugian atas pertukaran dengan aset tetap lain yang tidak sejenis, maka laba atau rugi atas pertukaran tersebut dapat diakui.

3.1.9 Pengungkapan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (2011:16.22) menyatakan bahwa laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap:

1. Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto.
2. Metode penyusutan yang digunakan.
3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

5. Rekonsiliasi jumlah tercatat ada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, perolehan melalui kombinasi bisnis, peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi, rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi, pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi, penyusutan, selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor, dan perubahan lainnya.

Untuk memilih metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset diperlukan pertimbangan. Oleh karena itu, pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam mengkaji kebijakan yang dipilih manajemen dan dapat pula menjadi perbandingan bagi perusahaan lain.

Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut diungkapkan:

- a. Tanggal efektif revaluasi.
- b. Apakah penilai independen dilibatkan.
- c. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset.
- d. Penjelasan mengenai nilai wajar aset tetap yang ditentukan secara langsung dengan mengacu pada harga yang didapat dari hasil penelitian dalam pasar aktif atau transaksi pasar terbaru yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain.
- e. Untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya.
- f. Surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-pembatasan distribusi kepada pemegang saham.

3.1.10 Dokumen Aset Tetap

Dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap yang bersangkutan adalah:

1. Surat permintaan otorisasi investasi (*expenditures authorization request*). Karena investasi dalam aset tetap biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana dalam jangka panjang waktu yang relatif panjang, maka pengendalian aset tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Perencanaan pengeluaran investasi dalam aktiva tetap dimulai dengan diajukannya usulan investasi kepada manajemen puncak. Melalui staff direksi, usulan investasi diteliti kelayakan teknis dan ekonomisnya yang hasilnya dituangkan dalam laporan studi kelayakan. Studi kelayakan tersebut digunakan untuk menyusun anggaran investasi (*capital budget*) untuk disetujui/diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Dokumen ini disebut surat permintaan otorisasi investasi.
2. Surat Permintaan Reparasi (*authorization for repair*), berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal.
3. Surat permintaan transfer aktiva, dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aktiva tetap.
4. Surat permintaan penghentian pemakaian aktiva tetap, dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aktiva tetap.
5. Surat perintah kerja (*work order*) yaitu dokumen yang memiliki dua fungsi sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aktiva tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aktiva tetap. Dokumen ini digunakan sebagai perintah kerja pemasangan aktiva tetap yang dibeli, pembongkaran aktiva tetap yang dihentikan pemakainnya.

6. Surat Order Pembelian, dokumen ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aktiva kepada pemasok.
7. Laporan Penerimaan Barang, dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aktiva tetap yang diterima dari pemasok.
8. Faktur dari pemasok yaitu dokumen yang merupakan tagihan dari pemasok atas aktiva tetap yang telah dibeli.
9. Bukti kas keluar merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi.
10. Bukti Kas keluar merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut.
11. Bukti Memorial digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aktiva tetap, harga pokok aktiva tetap yang telah selesai dibangun, penghentian pemakaian aktiva tetap dan pengeluaran modal.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Pengakuan Aset Tetap

Perusahaan mengakui mobil mitsubishi sebagai aset tetap karena mobil tersebut termasuk kelompok kendaraan, selain itu mobil mitsubishi tersebut juga dapat memberikan manfaat ekonomis dimasa mendatang karena akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional perusahaan untuk mengangkut pasir, batu, dan bahan-bahan material lainnya yang diperlukan dalam pembangunan.

Sedangkan didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 tahun 2011 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut di masa yang akan datang.
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

3.2.2 Penentuan Harga Perolehan Aset Tetap

Perusahaan memperoleh aset tetap melalui dua cara, yaitu dengan pembelian tunai dan pembelian angsuran. Untuk memperoleh mobil mitsubishi perusahaan melakukan pembelian secara angsuran melalui pihak bank.

1. Pembelian Angsuran

Pada tanggal 31 Oktober 2015 perusahaan melakukan pembelian angsuran terhadap 2 unit mobil mitsubishi sebagai kendaraan operasional perusahaan yang digunakan untuk mengangkut pasir, batu, kayu dan bahan-bahan material lainnya untuk pengerjaan proyek. Berikut ini rincian biaya untuk pembelian 1 unit Mobil Mitsubishi:

Harga OTR 1 (satu) unit mitsubishi FE 74 HDV 125 PS + Dump **Rp. 332.000.000**

(*Harga sudah termasuk PPN 10%+biaya pengurusan surat+dump truck)

Uang muka 30% dari Rp 332.000.000,- Rp.99.600.000,-

Biaya-biaya bank yang terdiri dari :

*Angsuran Pertama Rp.11.029.400,-

*Biaya Provisi Rp. 581.000,-

*Biaya Fidusia Notaris Rp. 300.000,-

*Biaya Administrasi Rp. 1.000.000,-

*Premi Asuransi (TLO) Rp. 6.753.000,-

Total Uang Muka 1 Unit Mitsubishi FE7 HDV 125 PS+Dump **Rp.119.263.400,-**

2X

Total uang muka 2 unit Mitsubishi FE7 HDV 125 PS+Dump **Rp. 238.526.800**

Pada saat pembayaran uang muka tersebut, perusahaan mencatat dengan jurnal :

Bukti kas no : 00-K28101302

(D) Uang Muka-DP 30% mitsubishi 2 unit Rp 238.526.800,-

(K) Kas- DP 30% mitsubishi 2 unit Rp 238.526.800,-

Sedangkan pada saat aset tetap tersebut diakui, perusahaan mencatat harga perolehannya sebesar nilai yang tercantum pada faktur pajak yaitu sebesar Rp 235.000.000,- per unit. Dan nilai Rp 235.000.000,- itulah yang dimasukkan kedalam daftar aset tetap sebagai harga perolehan dari 1 unit Mobil mitsubishi FE74HDV/R:MHMFE74P5DK105701. Perusahaan mencatatnya dengan jurnal sebagai berikut :

Bukti jurnal no : 00-cc011113

(D) Aset tetap-mitsubishi FE74HDV Rp 235.000.000,-

(D) Aset tetap-mitsubishi FE74HDV Rp 235.000.000,-

(D) PPN masukan-PPN mitsubishi 2 unit Rp 47.000.000,-

(D) Aset tetap-dump truck mitsubishi Rp 84.000.000,-

(D) Aset tetap-izin No.polisi, No.rangka Rp 63.000.000,-

(D) Hutang bank-Ang 1 BP9839TU Rp 9.683.334,-

(D) By.bunga Pinjaman BCA-Bunga BP9839TU Rp 1.346.066,-

(D) Hutang Bank-Ang 1 BP9840TU	Rp	9.683.334,-
(D) By.bunga Pinjaman BCA-Bunga BP9840TU	Rp	1.346.066,-
(D) By.adm bank-By.proses pembiayaan bank	Rp	16.106.000,-
(D) By.adm bank-By.provisi	Rp	1.162.000,-
(K) Uang muka-DP 30% mitsubishi 2 unit	Rp	238.526.800,-
(K) Hutang bank-Mitsubishi BP9839&9840	Rp	464.800.000,-

Dari jurnal diatas dapat diketahui bahwa perusahaan mencatat harga perolehan aset tetap mitsubishi tidak termasuk nilai PPN, dump truck mitsubishi, dan biaya pengurusan surat. Nilai PPN yang tertera pada faktur pajak sebesar Rp 47.000.000,- oleh perusahaan dicatat sebagai PPN masukan yang akan dikreditkan pada akhir bulan pelaporan SPT Masa PPN.

Sedangkan untuk biaya yang berhubungan dengan pihak bank sebagai proses awal dalam pembelian angsuran, perusahaan mengkapitalisasikannya dengan uang muka sebesar 30% yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan rincian sebagaimana yang telah tertera diatas.

Nilai hutang bank yang dicatat oleh perusahaan adalah sebesar :

Harga OTR 1 (satu) Unit Mitsubishi FE 74 HDV 125 PS+Dump	Rp332.000.000,-
Uang muka 30% dari Rp 332.000.000,-	(Rp 99.600.000,-)
Total Hutang 1 Unit Mitsubishi FE7 HDV 125 PS+Dump	Rp232.400.000,-
	<u>2 Unit X</u>
Total Hutang 2 Unit Mitsubishi FE7 HDV 125 PS+Dump	Rp464.800.000,-

Berdasarkan PSAK No.16 biaya perolehan harus dicatat sebesar nilai yang tertera pada faktur pembelian termasuk bea impor, pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tersebut dapat dipergunakan dalam kegiatan operasional kantor. Apabila terdapat diskon pembelian, maka diskon tersebut tidak termasuk kedalam harga perolehan aset tetap. Dengan begitu pencatatan harga perolehan aset tetap yang sesuai dengan PSAK No.16 yaitu :

(D) Aset tetap-mitsubishi	Rp 470.000.000,-
(D) PPN masukan-PPN mitsubishi 2 unit	Rp 47.000.000,-
(D) Aset tetap-mitsubishi-dump truck 2unit	Rp 84.000.000,-

(D) Aset tetap-mitsubishi-izin No.polisi, No.rangka	Rp 63.000.000,-
(D) Hutang bank-Ang 1 BP9839TU	Rp 9.683.334,-
(D) By.bunga Pinjaman BCA-Bunga BP9839TU	Rp 1.346.066,-
(D) Hutang Bank-Ang 1 BP9840TU	Rp 9.683.334,-
(D) By.bunga Pinjaman BCA-Bunga BP9840TU	Rp 1.346.066,-
(D) By.adm bank-By.proses pembiayaan bank	Rp 16.106.000,-
(D) By.adm bank-By.provisi	Rp 1.162.000,-
(K) Uang muka-DP 30% mitsubishi 2 unit	Rp 238.526.800,-
(K) Hutang bank-Mitsubishi BP9839&9840	Rp 464.800.000,-

Sehingga pada daftar aset tetap harga perolehan untuk 1 unit mitsubishi FE7 HDV 125 PS+Dump adalah sebesar Rp 617.000.000,- dimana harga tersebut sudah termasuk biaya pengurusan surat serta biaya pembuatan dump truck. Artinya dalam penetapan harga perolehan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan PT CIBTA WISESA UTAMA belum sesuai dengan PSAK No.16 karena adanya pencatatan terpisah antara harga mobil mitsubishi yang tertera pada faktur, dengan biaya pengurusan surat serta biaya pembuatan dump truck yang seharusnya semua biaya tersebut dikapitalisasikan kedalam harga perolehan aset tetap mobil mitsubishi.

2. Pembelian Tunai

Didalam menilai harga perolehan suatu aset tetap, perusahaan mengkapitalisasikan harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk dipakai seperti biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik nama, biaya pemasangan dan biaya percobaan kedalam harga perolehan aset tetap.

Pada saat pembelian aset tetap baru berupa kendaraan operasional perusahaan yang digunakan sebagai kendaraan untuk mengantarkan hasil produksi (*Readymix Concrete*) kepada pelanggan yang disebut dengan Truk Concrete Mixer dengan rincian biaya yang dikeluarkan sebagai berikut :

Harga Faktur Pembelian	Rp 431.680.925
PPn Masukan	Rp 43.168.092
Biaya Angkut	Rp 17.000.000
Biaya Pengurusan Surat	Rp 56.124.000

Perusahaan melakukan pencatatan dengan jurnal :

Kendaraan	Rp 504.804.925
PPN Masukan	Rp 43.168.092
Kas	Rp 547.973.017

Pada jurnal diatas perusahaan mengkapitalisasikan seluruh biaya yang berhubungan dengan perolehan aset tetap tersebut kedalam perkiraan kendaraan. Sedangkan PPn Masukan atas pembelian barang tersebut tidak dikapitalisasikan kedalam harga perolehan karena perusahaan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang nantinya PPn Masukan atas pembelian kendaraan tersebut akan dikreditkan pada akhir bulan pelaporan SPT Masa PPn.

Pada pembelian aset tetap berupa sepeda motor bekas yang digunakan untuk operasional kantor, perusahaan mengeluarkan uang kas sebesar Rp. 6.000.000 dan biaya pengurusan STNK yang telah mati selama dua tahun sebesar Rp. 450.000.

Perusahaan mencatatnya dengan jurnal :

Kendaraan	Rp 6.000.000
Kas	Rp 6.000.000

Dan untuk pengeluaran kas sebesar Rp. 450.000 atas pengurusan STNK, Perusahaan mencatatnya dengan jurnal :

Biaya lain-lain	Rp. 450.000
Kas	Rp 450.000

Pada pencatatan jurnal pembelian sepeda motor tersebut, perusahaan hanya mengakui jumlah kas yang dibayarkan sebesar Rp.6.000.000 sebagai harga perolehan aset tersebut. Sedangkan biaya pengurusan STNK dibebankan ke perkiraan biaya lain-lain. Hal ini jelas bertentangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Perusahaan seharusnya membukukan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang terjadi (seperti : Biaya Pengurusan STNK)

kedalam harga perolehan aset tetap tersebut. Karena penentuan harga perolehan aset tetap meliputi harga faktur dan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dalam rangka perolehan aset tetap tersebut sehingga aset tetap tersebut siap untuk digunakan atau dioperasikan.

Penentuan harga perolehan yang tidak tepat akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan tidak mencerminkan secara wajar nilai dari aset yang dimiliki perusahaan. Dengan tidak dikapitalisasinya pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dalam rangka perolehan aset tetap, akan mengakibatkan nilai aset kendaraan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan lebih rendah sebesar Rp. 450.000 dan biaya operasional yang disajikan dalam laporan laba/rugi akan tampak lebih besar, akibatnya laba pada tahun berjalan akan menjadi lebih kecil dari yang semestinya. Jurnal seharusnya adalah :

Kendaraan	Rp. 6.450.000
Kas	Rp. 6.450.000

3.2.3 Pengeluaran atas Aset Tetap Setelah Perolehan

Perusahaan menggolongkan pengeluaran setelah perolehan aset tetap kedalam pengeluaran beban karena setiap pengeluaran atas aset tetap setelah perolehan aset tetap tersebut oleh perusahaan akan dicatat sebagai biaya perawatan aset tetap. Biaya-biaya tersebut mencakup biaya service berkala, pembelian komponen-komponen kendaraan, penggantian oly mesin serta biaya-biaya lainnya yang dianggap dapat menjaga masa manfaat dari suatu aset tetap tersebut. Perusahaan belum pernah mencatat pengeluaran yang terjadi atas aset tetap kedalam penambahan nilai atas aset tetap tersebut atau mencatatnya sebagai pengeluaran modal.

Pada tanggal 27 November 2015 perusahaan menambahkan 8 keping per kepada lori mitsubishi, pencatatan atas pembelian per kepada lori tersebut dicatat dengan jurnal :

Bukti Kas no : 00-K27111305

(D) By.perawatan aset tetap-BP9839&9840-Per 8 keping Rp 1.800.000,-

(K) Kas-By.service BP9839&9840 Rp 1.800.000,-

Dalam hal ini, perusahaan telah sesuai dengan PSAK No.16 hanya saja pada saat pencatatan biaya yang dikeluarkan sebagai biaya pemeliharaan aset tetap, ada baiknya perusahaan membuat perkiraan biaya pemeliharaan aset per kelompok aset tetap. Misalnya, untuk biaya pemeliharaan aset tetap atas kendaraan, dibuatkan perkiraan “biaya pemeliharaan aset kendaraan” sehingga perusahaan dapat melihat secara rinci tentang biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap tertentu dan bisa mengestimasi biaya yang akan muncul di periode selanjutnya. Selain itu perusahaan juga bisa mencari solusi agar biaya yang timbul tersebut lebih diminimalisir dengan cara mencari sumber kenapa biaya tersebut sering terjadi dan apakah ada cara untuk mencegah terjadinya biaya tersebut muncul berulang kali.

3.2.4 Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional kantor pastinya tidak selalu bisa memberikan manfaat maksimal didalam penggunaannya, maka dari itu perlu adanya perkiraan penyusutan aset tetap. Dengan adanya pencatatan atas penyusutan aset tetap secara sistematis, perusahaan bisa mengetahui nilai yang tersisa dari manfaat yang akan diberikan aset tetap tersebut setelah digunakan dalam beberapa periode. Perusahaan mencatat penyusutan aset tetap dimulai ketika aset tersebut memiliki harga perolehan dan aset tersebut juga telah siap untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Jika didalam periode tertentu suatu aset sama sekali tidak digunakan, maka pencatatan atas penyusutan aset tetap tersebut tetap akan dilakukan setiap bulannya. Perusahaan mencatat biaya penyusutan aset tetap setiap bulan dengan mencatat seluruh jumlah beban penyusutan aset tetap yang ada. Metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan adalah metode garis lurus.

Perusahaan mencatat beban penyusutan aset tetap pada setiap akhir bulan dengan menggunakan ayat jurnal penyesuaian seperti dibawah ini :

Bukti jurnal no : 00-AJP111302

(D) Biaya penyusutan-Nov'15 Rp 10.801.505,-

(K) Akumulasi penyusutan-Nov'15 Rp 10.815.520,-

Berdasarkan daftar aset tetap PT CIBTA WISESA UTAMA diatas dapat dilihat bahwa perusahaan mencatat penyusutan atas aset tetap belum sesuai dengan PSAK No.16. Hal ini dikarenakan didalam PSAK No.16 diharuskan mengelompokkan pencatatan beban penyusutan suatu aset sesuai kelompok tertentu.

Seharusnya perusahaan melakukan pencatatan terhadap aset tetap sesuai dengan kelompok aset tetap masing-masing. Agar akumulasi penyusutan aset tetap juga dapat dikelompokkan.

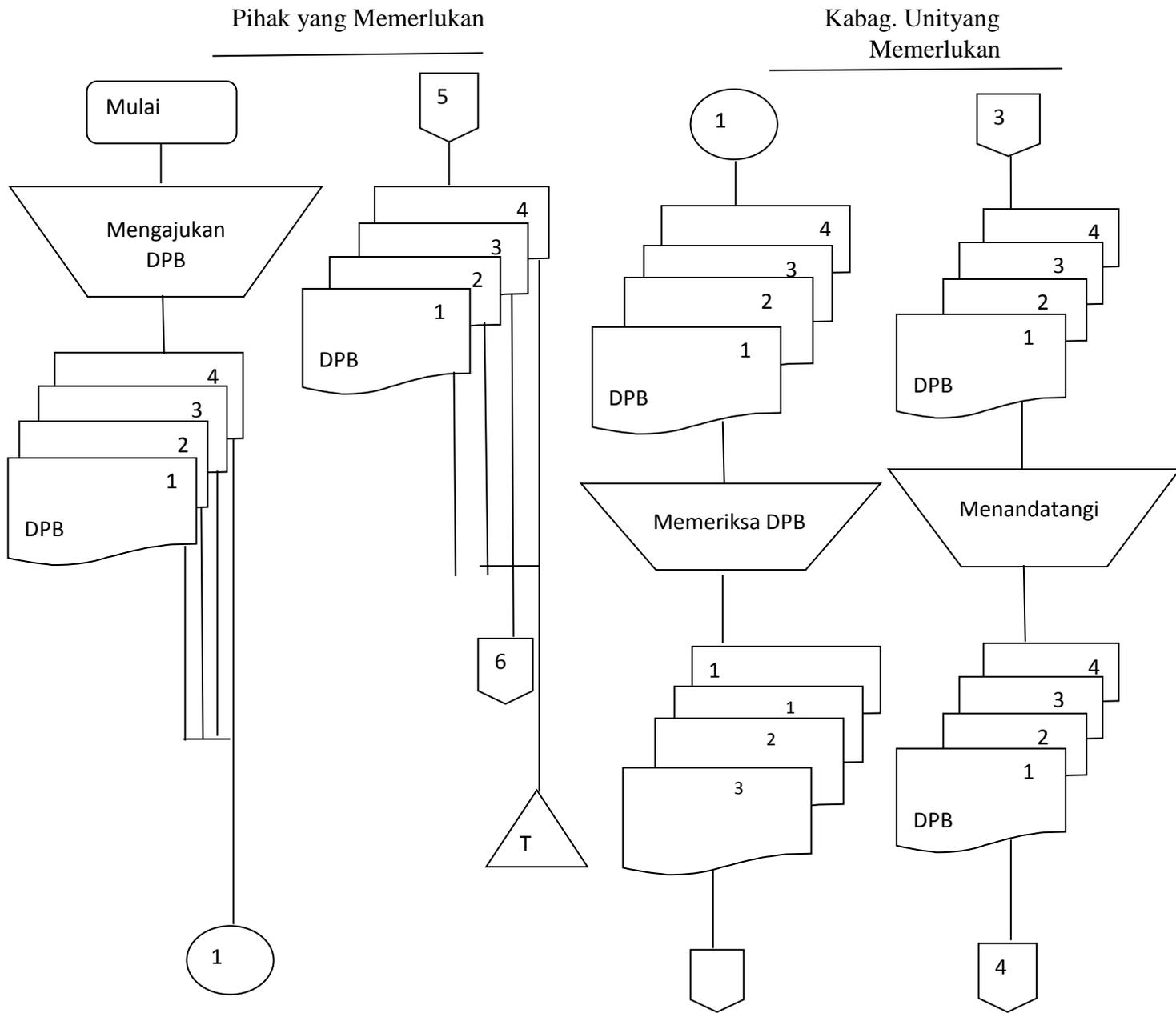
3.2.5 Penyajian Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan

Aset tetap didalam laporan keuangan yang dibuat oleh PT CIBTA WISESA UTAMA disajikan dengan mengkapitalisasikan seluruh nilai aset yang terdapat pada daftar aset tetap. Tidak ada penggolongan mengenai suatu kelompok aset tetap tertentu didalam laporan keuangan tersebut. Perusahaan beranggapan bahwa daftar aset tetap yang dilampirkan didalam laporan keuangan sudah cukup mewakili secara detail tentang aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan PSAK No.16 dan perlakuan ini sangat menyulitkan bagi pembaca laporan keuangan. Karena pembaca laporan keuangan tidak mengetahui jumlah aset tetap dari kelompok tertentu dan juga tidak dapat melihat nilai penyusutan aset tetap terhadap masing-masing kelompok aset tetap tersebut.

Sedangkan menurut PSAK No.16 mengharuskan adanya pengelompokkan dalam mencatat aset tetap dan dalam pengakumulasian penyusutan aset tetap tersebut, sehingga pencatatannya disajikan seperti berikut ini:

3.2.6 Prosedur Pembelian Aset Tetap

Bagian alir prosedur pembelian aset tetap

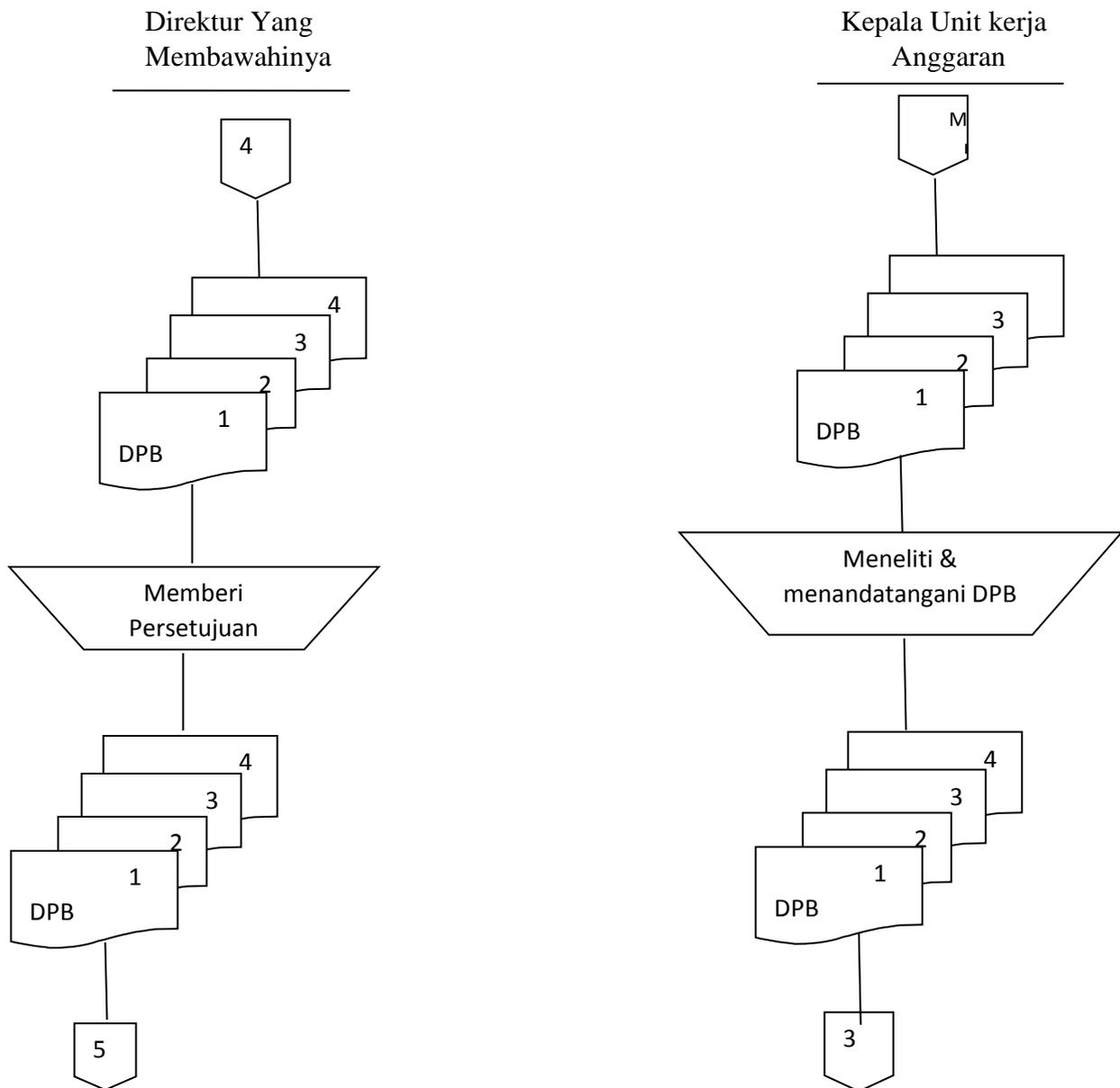


Keterangan :

DPB : Daftar Permintaan Barang

Gambar 3.1 Pembelian Aset Tetap

Sumber : PT Cibta Wisesa Utama



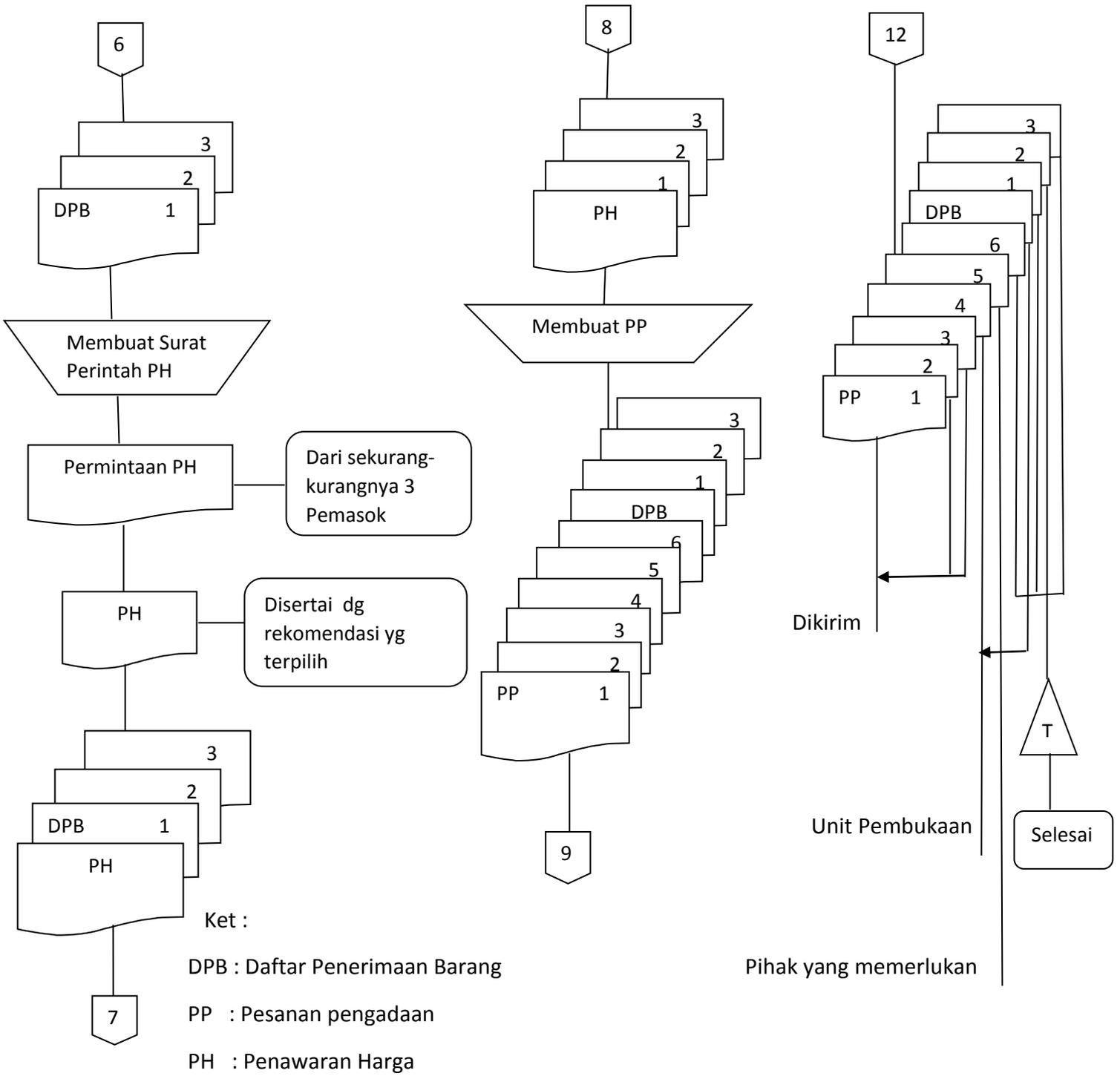
Keterangan :

DPB : Daftar Permintaan Barang

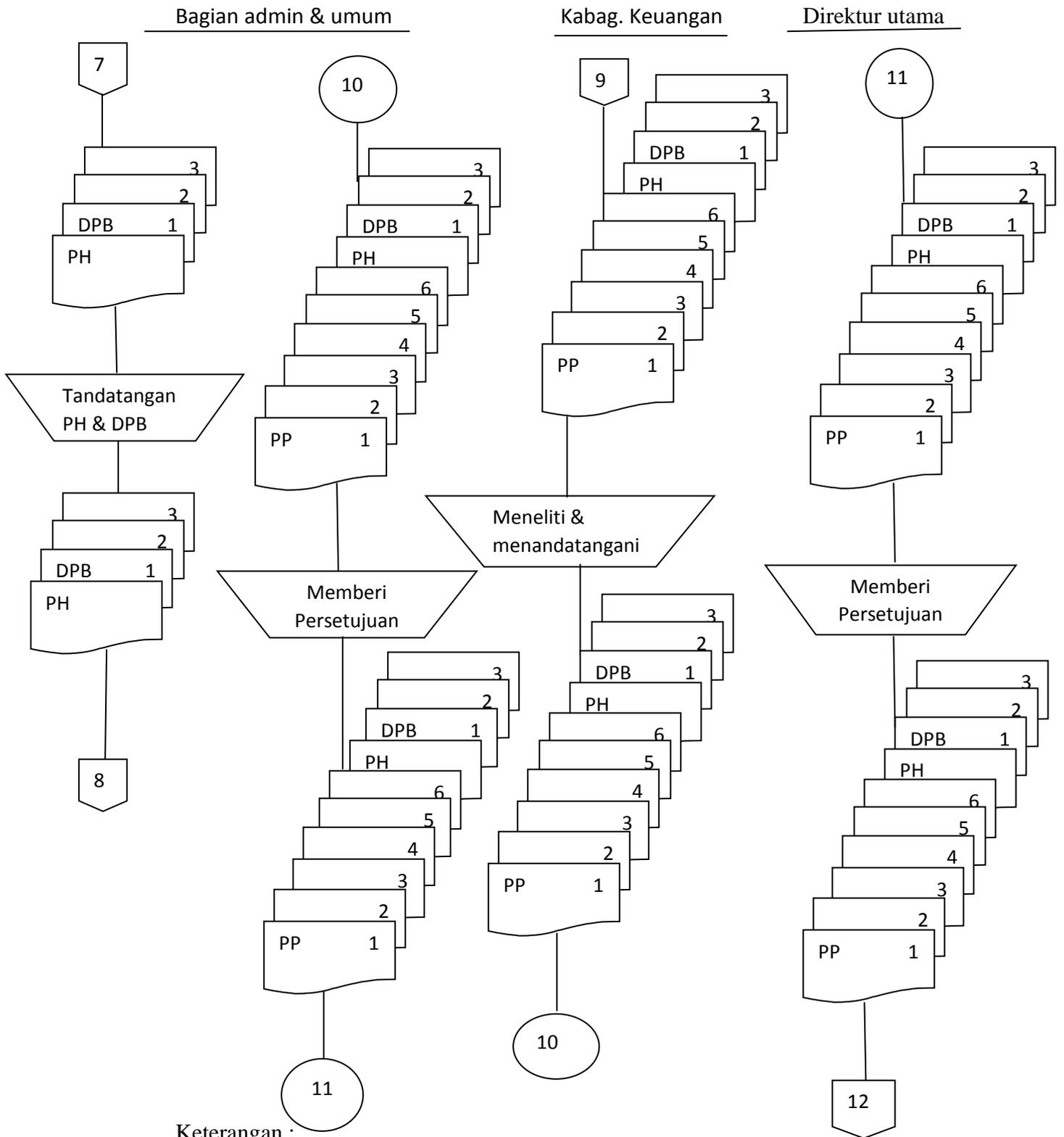
Lanjutan Gambar 3.1 Pembelian Aset Tetap

Sumber : PT Cibta Wisesa Utama

Unit Pembelian



Lanjutan Gambar 3.1 Pembelian Aset tetap

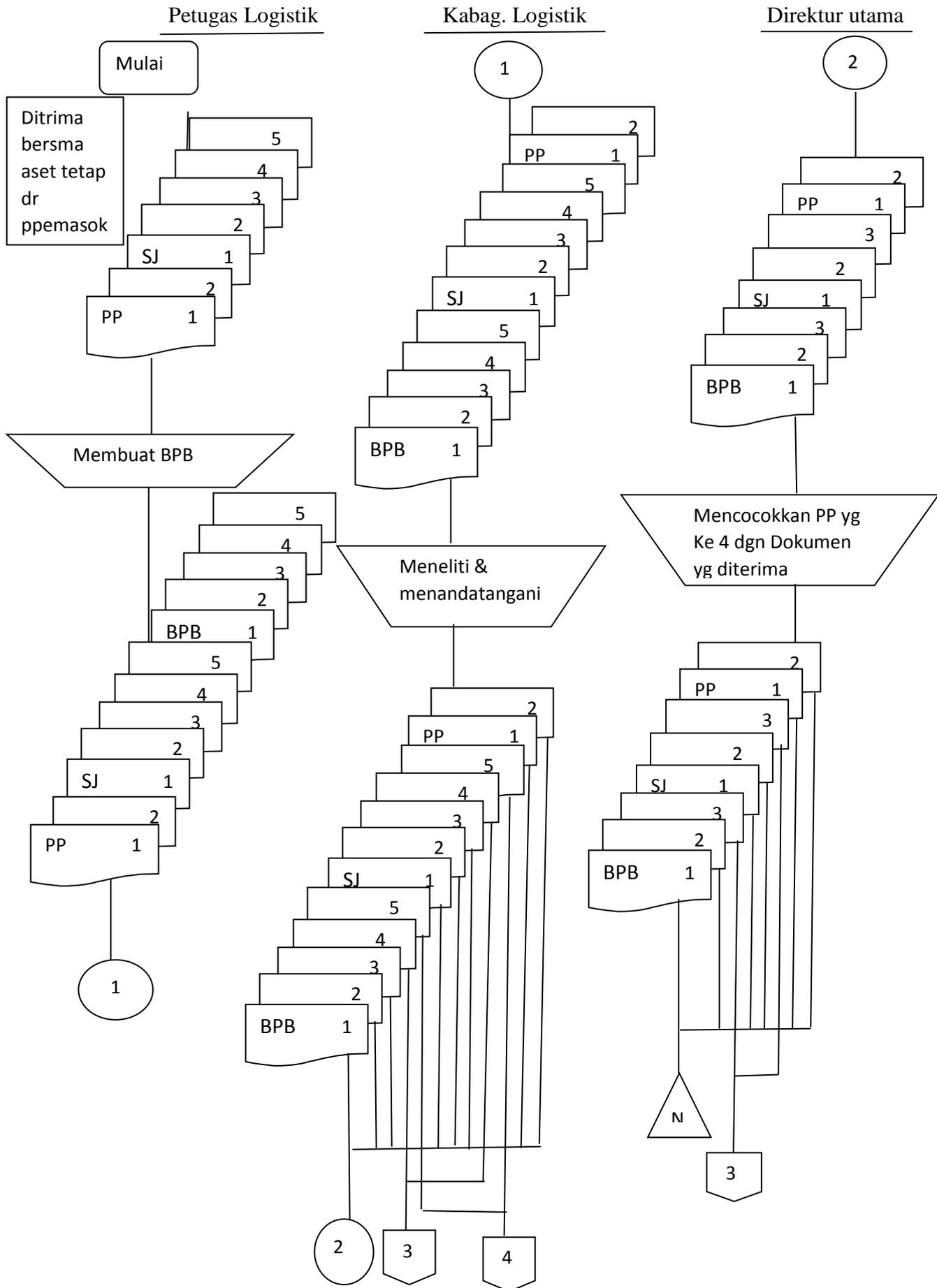


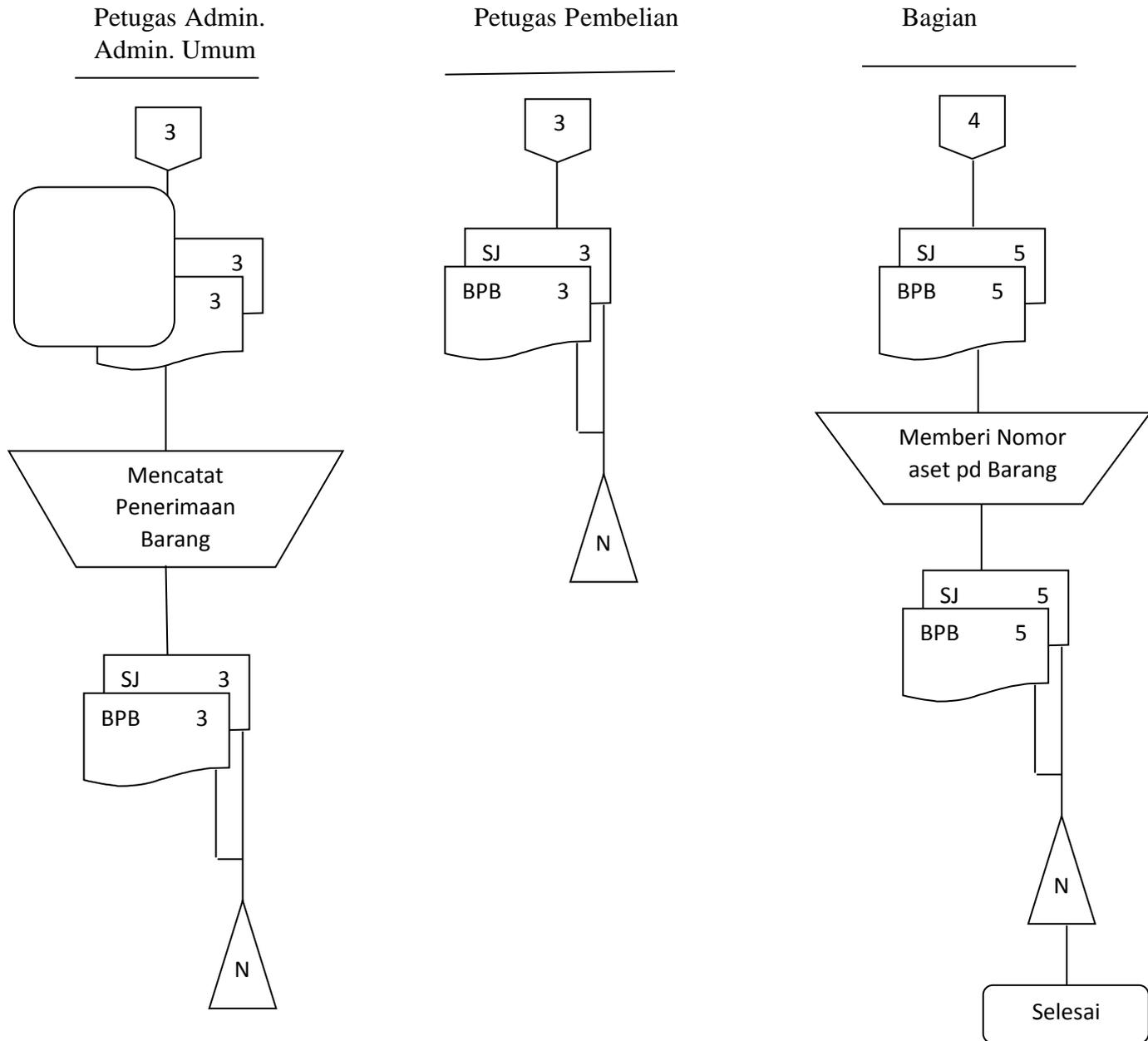
Keterangan :

- DPB : Daftar Penerimaan Barang
- PP : Pesanan Pengadaan

Lanjutan Gambar 3.1 Pembelian Aset Tetap

3.2.7 Prosedur Penerimaan Aset Tetap





Keterangan :

SJ : Surat Jalan

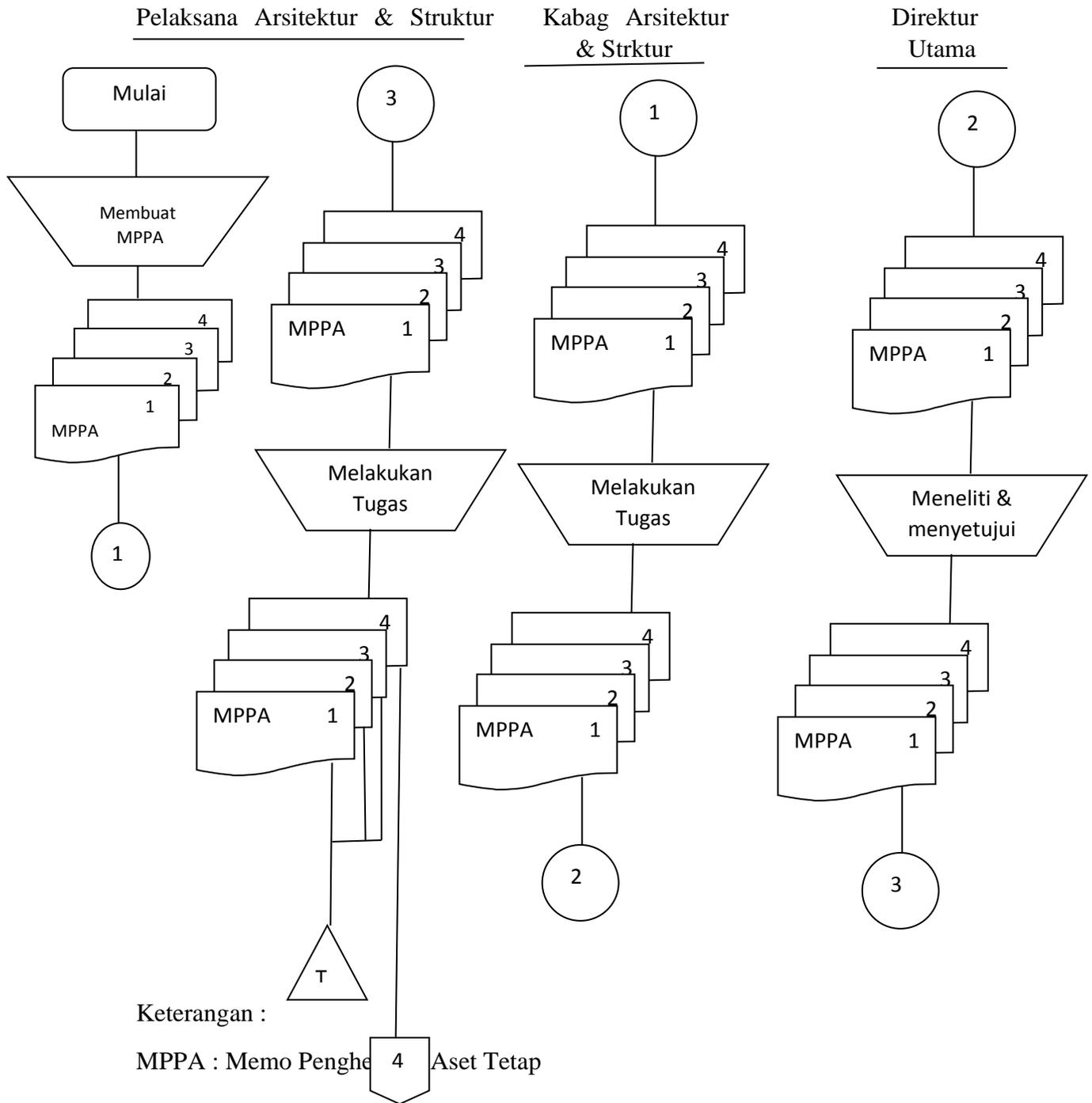
BPB: Bukti Penerimaan Barang

PP : Pesanan Pengadaan

Lanjutan Gambar 3.2 Penerimaan Aset Tetap

Sumber : PT Cibta Wisesa Utama

3.2.8 Prosedur Penghentian Aset Tetap

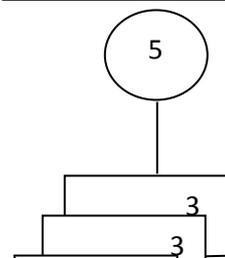


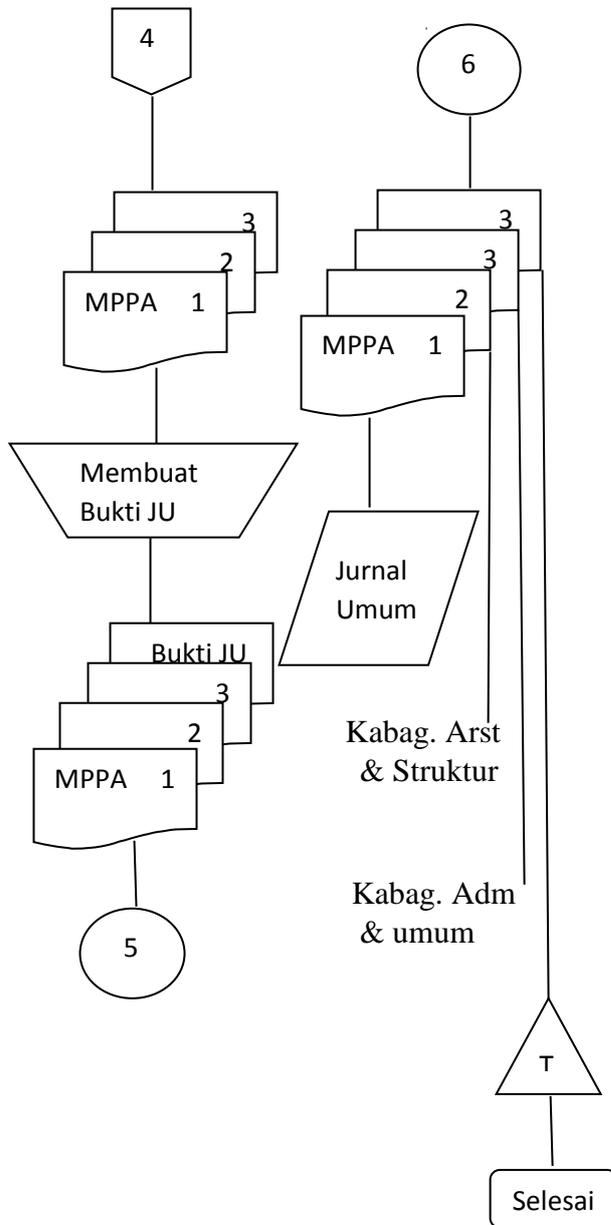
Gambar 3.3 Penghentian Aset Tetap

Sumber : PT Cibta Wisesa Utama

Kabag Admin.

Kabag. Keuangan





Keterangan :

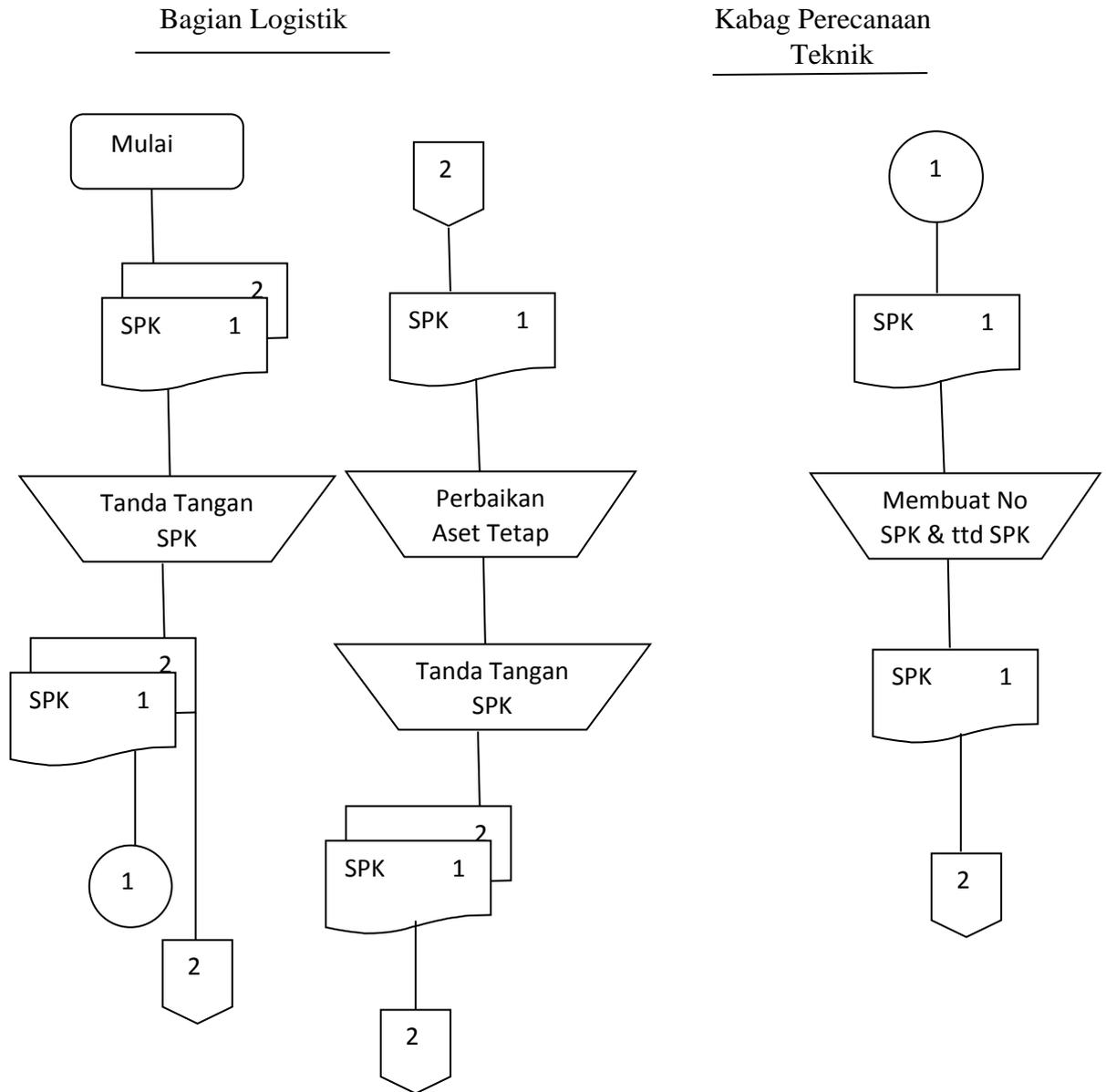
MPPA : Memo Penghentian Pemakaian Aset Tetap

JU : Jurnal umum

Lanjutan gambar 3.3 Penghentian Aset tetap

Sumber PT Cibta Wisesa Utama

3.2.9 Prosedur Pemeliharaan Aset Tetap



Keterangan :

SPK : Surat Perintah Kerja

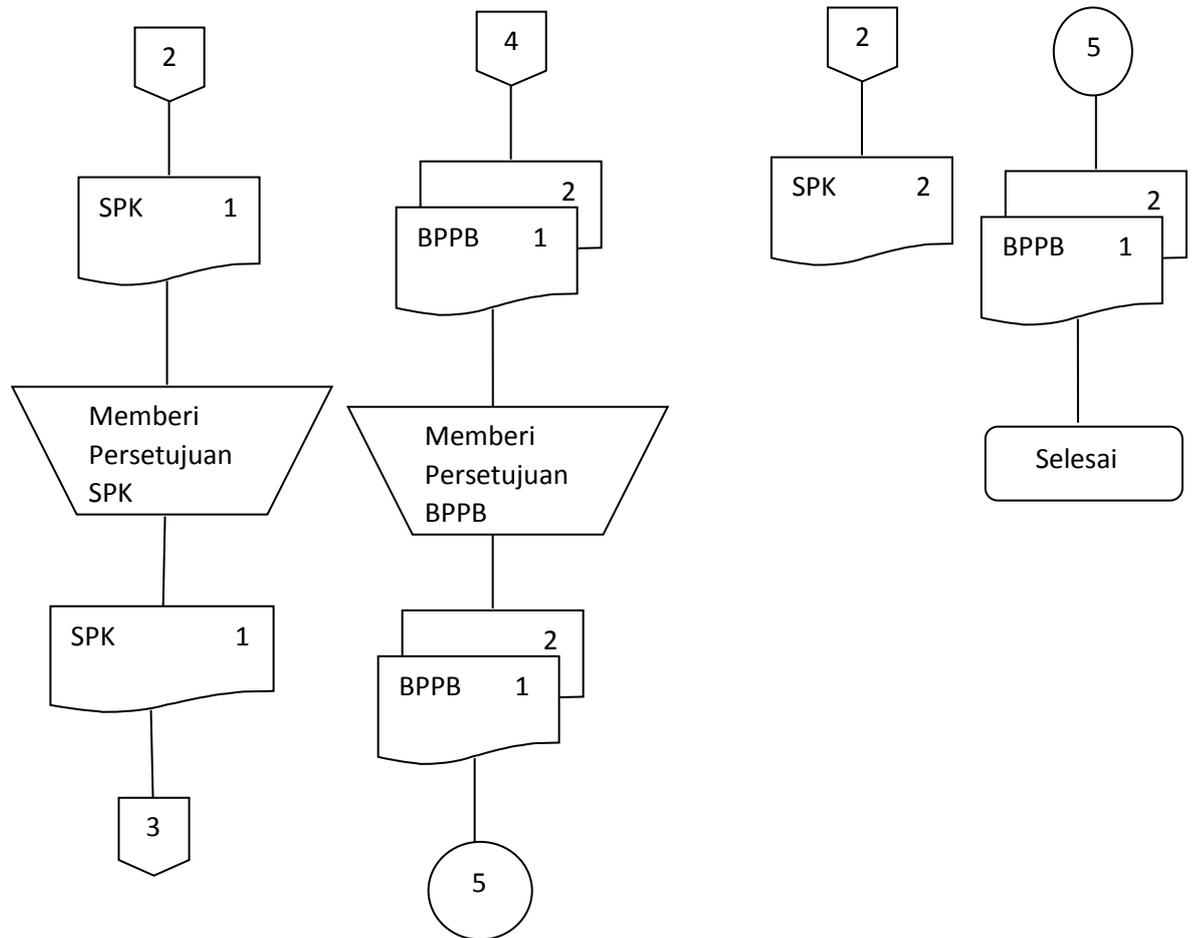
BPPB : Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang

Gambar 3.4 Pemeliharaan Aset Tetap

Sumber : PT Cibta Wisesa Utama

Kabag Teknik

Petugas Logistik



Keterangan :

BPPB : Bukti Permintaan & Pengeluaran Barang

SPK : Surat Perintah Kerja

Lanjutan gambar 3.4 Pemeliharaan Aset Tetap

Sumber : PT Cibta Wisesa Utama

3.2.10 Dokumen dan Catatan Akuntansi Aset Tetap

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam aset tetap pada PT Cibta Wisesa Utama yaitu:

1. Daftar Permintaan Barang (DPB)
2. Pesanan Pengadaan (PP)
3. Bukti Penerimaan Barang (BPB)
4. Kwitansi
5. Surat Perintah Kerja (SPK)
6. Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang
7. Memo Penghentian Pemakaian Aset Tetap
8. Jurnal umum
9. Voucher
10. Buku Pembantu Aset Tetap

